

Perempuan Pelestari Budaya: Warisan Ingatan Perempuan Keraton dalam Koleksi Arsip Lisan ANRI

Agus Santoso

Arsip Nasional Republik Indonesia

Email: agusant66.as@gmail.com

Muhamad Tris Hadi Pratama

Arsip Nasional Republik Indonesia

Email: muhamad.trishadi@gmail.com

Abstract

The development of women's history must continue to be improved due to the lack of availability of sources that record women's roles in Indonesian history. Faced with that condition, the oral history method is present as an alternative source to answer the shortage of these sources. Recognizing the importance of oral history, the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) is a national archival institution that maintains and preserves authentic sources in the form of archives from various mediums and carries out oral history interviews to complete and fill in the gaps of certain events that have occurred in Indonesia. the past. Regarding women's progress, ANRI's oral history interview with the theme of the Relatives of the Kingdom of the Nusantara shows the role of women in cultural preservation. ANRI interviewed three female sources from three different kingdoms, namely G.R.Ay. Retno Rosati Kadarisman Notohadiningrat from Mangkunegaran, GKR Koes Murtiyah Wandansari from Surakarta, and Anak Agung Ayu Dewi Girindra Wardani from Karangasem. This article discusses how ANRI's oral history activities led to the role of women in the Kingdom of the Nusantara in cultural preservation so that it can be an alternative source as a complement to the ANRI archive treasures that are useful to be used today and in the future.

Keywords: *Oral History, Women of the Kingdom of the Nusantara, Cultural Preservation*

Pendahuluan

Mengangkat perempuan dalam sejarah telah menjadi tantangan tersendiri bagi sejarawan. Sherna Gluck (1977) seorang sejarawan feminis menggambarkan kondisi yang sulit, saat awal pengembangan bidang sejarah perempuan karena bertumpu pada konsep dan metode sejarah konvensional. Pasalnya begitu sedikit ketersediaan dokumentasi yang merekam tentang kehidupan dan aktivitas para perempuan di masa lalu. Alhasil, para sejarawan perempuan itu, sibuk mencari petunjuk tersembunyi tentang "pahlawan perempuan yang hilang," lalu jika memungkinkan, mencari yang masih hidup untuk diwawancarai mengenai pengalaman masa lalu mereka. Layaknya upaya Allan Nevins dalam mengembangkan sejarah lisan menjadi satu bidang kajian dalam Ilmu Sejarah pada tahun 1948, setelah mendirikan Kantor Riset Sejarah Lisan di ruang bawah tanah Perpustakaan Butler di Universitas Columbia (Hoyle, 1972). Akhirnya, rekaman suara sebagai hasil dari sejarah lisan dapat menciptakan sumber-sumber alternatif, guna menghadapi kekeringan sumber dalam mengembangkan sejarah perempuan.

Menyadari esensi dan pentingnya sejarah lisan sebagai sumber alternatif, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjalankan program dan kegiatan wawancara sejarah lisan. Adapun tujuan dari kegiatan itu tercantum pada bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 pasal 91, yakni dalam rangka melengkapi dan mengisi kekosongan khazanah tentang rekaman peristiwa tertentu. ANRI menerapkan Sejarah lisan pertama kali pada tahun 1973-1974 (Bachtiar, 1982). Program dan kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan panitia pengarah yang profesional, seperti Harsja W. Bachtiar (Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia), Sartono Kartodirdjo (Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada), Taufik Abdullah, Abdurachman Surjomihardjo, A.B. Lopian, dan Sumber Daya Manusia (SDM) ANRI.

Pada debut pertamanya, ANRI mendapatkan bantuan dari Ford Foundation untuk keperluan sarana dan prasarana, serta pengiriman tenaga ke luar negeri untuk belajar sejarah lisan. ANRI memulai dengan membahas beberapa periode krusial, seperti biografi para tokoh nasional dan daerah, serta periode Jepang. Dengan menjadikan para tokoh nasional maupun daerah sebagai narasumber, baik mantan menteri masa Presiden Sukarno, para pemimpin partai politik, tokoh militer tahun, hingga pemimpin-pemimpin Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) / Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) (Erman, 2011). Menariknya, pada periode awal itu, ANRI membuka lebar ruang keterlibatan perempuan sebagai narasumber. Hal ini tampak dari banyak nama perempuan yang terpampang dalam Daftar Wawancara Sejarah Lisan ANRI dari kurun waktu 1975-2005, sehingga menjadi representasi perempuan dalam sejarah bangsa yang bermanfaat sebagai referensi kiprah perempuan di masa lalu (ANRI, 2005).

Salah satu kiprah perempuan yang menarik dalam khazanah wawancara sejarah lisan ANRI adalah yang terekam dengan tema Kerabat Kerajaan Nusantara. ANRI melakukan wawancara terhadap tiga narasumber perempuan dari tiga lingkungan kerajaan yang berbeda, yakni G.R.Ay. Retno Rosati Kadarisman Notohadiningrat (RRK) dari Mangkunegaran, GKR Koes Murtiyah Wandansari (KMW) dari Surakarta, dan Anak Agung Ayu Dewi Girindra Wardani (DGW) dari Karangasem. Dari ketiga kesaksian itu, sangat terlihat peran penting mereka bersama perempuan lainnya di lingkungan kerajaan dalam upayanya untuk melestarikan budaya. Hal ini menjadi menarik karena peran pelestarian budaya tersebut tidak terlalu muncul dalam khazanah arsip di ANRI. Terlebih saat ini posisi perempuan di Kerajaan Nusantara telah berubah karena modernisasi. Perempuan tidak hanya identik dengan hal domestik saja, namun juga dapat mengurus sektor publik seperti pelestarian budaya. Selain itu, pelestarian budaya juga menghadapi tantangan besar, yaitu kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang membuat kaum muda meninggalkan budaya setempat, dan lebih memilih budaya barat karena lebih modern dan menjanjikan. Dalam artikel ini membahas bagaimana kegiatan sejarah lisan ANRI memunculkan peran perempuan Kerajaan Nusantara dalam pelestarian budaya, sehingga

dapat menjadi sumber alternatif sebagai pelengkap khazanah arsip ANRI yang berguna untuk dapat dimanfaatkan pada saat ini hingga di masa mendatang.

Perempuan di Lingkungan Kerajaan Nusantara

Lingkungan kerajaan pada umumnya adalah masyarakat tradisional yang berdiri di atas tradisi secara turun-temurun. Lazimnya masyarakat tradisional menganggap posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Perempuan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya, bahkan tidak diberi kesempatan untuk maju, karena terikat norma-norma yang menganggap kaum perempuan hanya untuk menjadi calon pelayan suami dan mengurus hal-hal domestik di dalam rumah (Gardine, 1996). Di Jawa misalnya, perempuan sebagai istri bertanggung jawab dalam mengurus kerja-kerja rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai suami bertugas mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, kecuali keluarga kelas bawah yang juga melibatkan istri untuk mencari pendapatan tambahan (Geertz, 1983). Walaupun demikian, di Jawa juga terdapat beberapa fenomena menarik yang memperlihatkan perempuan berkiprah di luar urusan domestik.

Salah satu kiprah perempuan di luar ranah domestik adalah di bidang militer. Seorang Profesor *Asian Studies* dari Australian National University, Ann Kumar (2008), menjelaskan dengan merujuk *Babad Tuter* yang ditulis oleh seorang anggota prajurit *estri* Mangkunegaran pada dasawarsa terakhir pemerintahan Mangkunegara I, bahwa pada periode kekuasaan Sultan Agung pada 1613 hingga 1645 terdapat kesatuan prajurit perempuan atau korps prajurit *estri* yang bertugas sebagai pengawal Sultan. Rijklof van Goens, Duta besar luar biasa Belanda mengunjungi Mataram pada pertengahan abad ke-17 memperkirakan ada sekitar 150 orang yang tergabung dalam korps prajurit *estri*. Namun, keterlibatan perempuan di sektor militer ini tidak bisa dikatakan sebagai munculnya kesetaraan gender maupun emansipasi, melainkan memang sudah kebiasaan raja-raja di Asia Tenggara dikelilingi ribuan perempuan. Raja Angkor memiliki 4000-5000 lima ribu perempuan di istananya, Iskandar Muda Aceh mempunyai 3000 perempuan, bahkan Kerajaan Siam di Thailand juga memiliki satuan pengawal perempuan bernama *Sanam Dahar* (Ardanareswari, 2020). Selain itu juga terkait dengan masalah kepercayaan karena perempuan dianggap lebih loyal dan tidak rawan terlibat kudeta atau pengkhianatan. Hal ini terlihat dalam pendapat Anthony Reid (2020) terkait alasan Sultan Alaudin Riayat Syah al-Mukammil dari Aceh Darussalam pada abad ke-16 mengangkat Keumalahayati sebagai laksamana angkatan laut karena kesetiaannya.

Pasca konflik antar *trah* Mataram selesai, Raden Mas Said yang dijuluki Pangeran *Sambernyawa* dan menjadi Pangeran Mangkunegara I setelah Perjanjian Salatiga memberikan perkembangan yang baik untuk posisi perempuan. Mangkunegara I juga meneruskan tradisi perekrutan prajurit *estri*, namun para perempuan itu tidak hanya dibekali latihan militer saja, tetapi juga pelajaran membaca dan menulis yang semuanya diajari langsung oleh Sang Pangeran Sambernyawa (Wardhana, 2015). Keberadaan *Babad Tuter* sendiri menjadi bukti dari keterampilan prajurit *estri* dalam menulis, bahkan telah menjadi sumber yang sangat bermanfaat untuk mengkaji berbagai kondisi pada saat itu, khususnya tentang prajurit perempuan. Walau hanya sebatas para perempuan di dalam Pura Mangkunegaran, upaya pendidikan terhadap prajurit *estri* merupakan awalan munculnya kesempatan pendidikan bagi perempuan. Akses pendidikan bagi perempuan adalah lambang kemajuan dan kesetaraan karena dengan pendidikan perempuan siap memasuki ranah publik.

Peran perempuan di dunia militer juga tampak di Kasunanan Surakarta. Menurut sejarawan Inggris ahli Diponegoro Peter Carey (2018), Joseph Donatiën Boutet asal Prancis yang hendak menyewa tanah dari kesultanan pada masa Pakubuwono V tahun 1820-1823, melihat Korps Srikandi kisaran 40 orang perempuan berjejer duduk di bawah singgasana sunan dengan persenjataan lengkap, seperti pedang, bedil, dan keris. Belum ada sumber yang memperlihatkan

Korps Srikandi mendapatkan pendidikan membaca dan menulis layaknya prajurit *estri* di Mangkunegaran. Tidak adanya pendidikan bagi Korps Srikandi bukan berarti kondisi perempuan di Surakarta lebih buruk dibanding Mangkunegaran. Pendidikan pada saat itu belum menjadi hal yang penting ditujukan kepada rakyat termasuk juga perempuan, hanya beberapa kalangan elit saja yang dapat mengenyam pendidikan dengan sistem tradisi dan agama.

Setidaknya hingga di awal abad ke-20, terjadi perubahan pada kondisi perempuan dampak dari perkembangan masyarakat akibat liberalisasi dan politik etis Belanda. Terbukanya keran-keran investasi di wilayah Hindia Belanda menyebabkan para pemodal dan tenaga profesional asing datang dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat Jawa menjadi semakin terbuka. Semula tradisi agung keraton dan tradisi-tradisi yang melekat pada perilaku masyarakat mulai berangsur terpengaruh gaya barat, seperti orang Jawa yang bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda dan swasta atau yang berpendidikan sekolah sistem barat, mereka lebih memilih bergaya hidup seperti orang Eropa, bahkan banyak di antara mereka yang lebih lancar berbahasa Belanda dibandingkan melayu atau Jawa (Kasuma, 2020). Pendidikan pun dibuka kepada seluruh masyarakat hingga pribumi untuk memenuhi kebutuhan industri akan Sumber Daya Manusia (SDM). Berbagai institusi pendidikan mulai berdiri pada saat itu, salah satunya sekolah khusus perempuan. Bagi perempuan dari kalangan elit, industrialisasi memberikan kesejahteraan kepada mereka karena mendapatkan akses pendidikan modern. Namun, perempuan kelas bawah semakin terhimpit, hingga banyak dari mereka berakhir hanya menjadi pelacur dan gundik untuk bertahan hidup (Lombard, 2005), serta terobjektifikasi dalam iklan-iklan produk alat bantu seks (Kasuma *op.cit.*, 2020).

Baik di Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran mulai mendirikan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi para putra-putri keraton. Di Kasunanan Surakarta, Pakubuwono X membangun sekolah *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Kasatriyan pada 1 November 1910, *Frobelschool Pamardi Siwi* pada 26 Agustus 1926, dan HIS *Parmadi Putri* pada 1 Juli 1927. Kehadiran sekolah-sekolah tersebut membuat perempuan di lingkungan Kasunanan semakin terdidik, bahkan putri GRA. Wuryaningrat menginisiasi pembentukan organisasi perempuan kerabat keraton bernama Putri Narpo Wandowo pada 5 Juni 1931 yang bertujuan untuk memajukan para perempuan keraton dan pelestarian budaya. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan keraton mulai bergeser menjadi perempuan modern. Begitu juga di Kadipaten Mangkunegaran, pada tahun 1912 didirikan sekolah *Siswo* yang berubah menjadi HIS Mangkunegaran *School* di 1914, kemudian mendirikan sekolah *Siswo Rini* khusus untuk perempuan pada tanggal 18 September 1912 yang bertempat di halaman Istana Mangkunegaran. Beberapa pertanda dampak kemajuan perempuan Mangkunegara, yaitu keaktifan putri pertama Mangkunegara VII dari selir Mardewi bernama BRAy Partini dalam berorganisasi, lalu seniman Nyi Bei Mardusari atau Nyi Tumenggung Mardusari yang karyanya mendunia, hingga peran Gusti Kanjeng Ratu Timoer dalam pengembangan seni, budaya, dan pendidikan perempuan. Pada akhirnya, perempuan dalam lingkungan Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran akhirnya memiliki peran di luar urusan domestik, yakni sebagai pelestari atau *penguri-uri* budaya dalam istilah Kasunanan Surakarta (Astuti & Pratama, 2015; Hastuti dkk., 2021).



Pagelaran tari Bedoyo Mangkunegaran pada hari pernikahan Partini dan Husein Djajadiningrat Solo, Jawa Tengah 1921. Sumber: ANRI, KIT Jawa Tengah No 224-72.

Jika di Jawa perempuan bisa berada di ranah militer, perempuan di Bali tidak banyak terlihat di luar urusan domestik. Walaupun ajaran Agama Hindu memposisikan perempuan setara dengan laki-laki, namun budaya patrilineal yang mempengaruhi adat Bali membuat posisi laki-laki berada di atas perempuan, seperti dalam hal warisan hanya anak-laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya sebagai penikmat tanpa punya hak atas warisan, sehingga tidak semua orang tua mau memberikan kesempatan pendidikan bagi anak perempuannya (Rahmawati, 2016). Dengan kondisi seperti itu, wajar saja perempuan di Bali tidak terlalu terlihat kiprahnya di ruang publik dalam arus sejarah.

Akan tetapi, menjelang akhir abad ke-19, Belanda berhasil berkuasa penuh atas Bali, lalu membentuk birokrasi pemerintahan di Bali yang menjadikan Kerajaan Karangasem sebagai *stadhouder* yang dijabat oleh I Gusti Gede Jelantik. Belanda pun menerapkan politik etis seperti di Jawa, berbagai sekolah berdiri di tanah Bali pada kurun waktu 1929-1932, di antaranya 15 *tweede klassen school* di Karangasem yang diperuntukkan kepada rakyat biasa (Budharta dkk, 1986). Namun tidak diketahui apakah politik etis memunculkan perempuan modern di lingkungan Kerajaan Karangasem, seperti yang terjadi di Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Begitu juga terkait munculnya perkumpulan perempuan yang bernama Perukunan Istri di Denpasar pada 1934, tidak dapat dipastikan apakah ada keterlibatan perempuan dari lingkungan Kerajaan Karangasem dalam organisasi itu yang menjadi pertanda bergesernya posisi perempuan.



Pertunjukan Tari Arja/Gambul dan pemain gamelan, Bali. Sumber: ANRI, Kit Bali No 0174 10-12.

Meskipun belum jelas kapan perempuan di lingkungan Kerajaan Karangasem mulai tersentuh modernisasi, seperti telah mengenyam pendidikan dan melakukan peran di luar urusan rumah tangga, maka disinilah pentingnya rekaman-rekaman suara hasil dari kegiatan Wawancara Sejarah Lisan ANRI. Sebuah wawancara dengan tema Kerabat Kerajaan Nusantara kepada keluarga Kerajaan Karangasem menjadi pelengkap kekosongan itu. Tim Pewawancara Sejarah Lisan ANRI yang diwakili oleh Eva Julianty mewawancarai Anak Agung Ayu Dewi Girindra Wardani (DG), yakni seorang cucu dari *stadhouder* II bernama I Gusti Bagus Jelantik yang bergelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem pada 4 Juli 2019 di Puri Agung Karangasem. Dalam wawancara itu, DG memberikan keterangan terkait pendidikan di keluarga kerajaan, sebagai berikut:

“Nggih e...di sini kakek (I Gusti Bagus Jelantik) paling dekat dengan Pakualam kan ada fotonya beliau itu. Karena putra-putri beliau dulu katakanlah beliau termasuk raja paling modern ya, berani menyekolahkan putra-putrinya ke luar dari Bali, ada di Jogja waktu itu di keluar ke Jawa, semua putra-putrinya tinggal di Keraton Pakualam. Jadi sampai sekarang pun masih terjalin hubungan dengan Pakualam. Beliau menitipkan putra-putri beliau di sana. Ini kan ada fotonya, karena beliau berkunjung ke sana, habis itu setelah itu juga ada paman-paman kami sekolah sampai ke Belanda. Dokter Jelantik (Anak Agung Made Djelantik) itu doctor... (kurang jelas) ke Belanda sampai Makassar ada, di sini kata, jaman itu termasuk paling berani pikirannya paling majulah katakan, sudah berani menyekolahkan putra-putrinya keluar Bali ini, di samping di Denpasar juga ke Jawa, habis itu ke Belanda. Salah satu putranya dulu ada jadi dokter WHO Dokter Jelantik itu.....(sambung) Putrinya ada jadi hakim agung pertama perempuan di Bali.....Nggih, habis tuh jadi hakim agung di Jakarta. Maju termasuk, kategori kakek jaman itu sudah beranilah menerobos....Biasanya kan itu tabu ya? Pendidikan itu untuk maju (Wardani, wawancara, 4 Juli 2019).”

Sangat jelas bahwa saat periode I Gusti Bagus Jelantik dari 1908-1966, perempuan di lingkungan kerajaan, khususnya keluarga dari raja mendapatkan pendidikan yang sebelumnya dianggap sebagai hal tabu. Putri raja yang menjadi hakim agung perempuan pertama dari Bali adalah Anak Agung Ayu Mirah yang diangkat pada tahun 1995. Anak Agung Ayu Mirah merupakan salah satu lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1961 dan sempat menjalani tugas belajar di Leiden, Belanda tahun 1981 untuk mendalami aspek hukum malpraktek kedokteran (Sejarah Bali, 2020). Dengan demikian perempuan di lingkungan Kerajaan Karangasem telah mengalami modernisasi dan berkiprah di ruang publik.

Dari rangkaian tulisan di atas, bahwa pelestarian budaya telah dimulai oleh para perempuan kerajaan pada masa lalu dan oleh karena masuknya budaya modern, banyak perempuan yang tidak peduli lagi untuk melestarikan budaya. Namun pada masa *millenial* ini, mulai bangkit lagi para perempuan yang berjuang keras untuk melestarikan budaya.

Perempuan Keraton Melestarikan Budaya

Selain telah merambah ruang publik, perempuan di lingkungan Kerajaan Karangasem saat ini mendapatkan peran sebagai pelestari budaya. DG sendiri selaku narasumber merupakan dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, Bali (Abdullah, 2016). Berbekal profesinya sebagai akademisi ilmu budaya dan posisinya sebagai perempuan keluarga kerajaan, DG berperan dalam melakukan pelestarian budaya. Salah satunya, DG sebagai putri *penglingsir* (pemimpin puri) juga memiliki tanggung jawab mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara-upacara yang ada di Karangasem dan menghadiri acara yang diselenggarakan di desa-desa sekitar Puri Agung Karangasem (Wardani, wawancara, 4 Juli 2019). Misalnya dalam upacara *Usaba Sumbu* atau *Usaba Dalem*, acara tersebut baru bisa terlaksana jika keluarga kerajaan hadir karena harus menghaturkan *sesajen*. Upacara *Usaba Sumbu* memiliki makna sebagai persembahan untuk memohon *amerta* atau sumber kehidupan dan kemakmuran serta kesejahteraan untuk seluruh penduduk desa (Ardika & Suastika, 2019). Walaupun kekuasaan Kerajaan Karangasem telah lama berada di bawah pemerintahan Indonesia, masyarakat tetap menganggap keluarga kerajaan sebagai panutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kendati telah modern, tradisi adat terkait dengan perempuan masih dipertahankan di Kerajaan Karangasem. DG menuturkan sebuah prosesi adat untuk perempuan yang masih dilakukan, sebagai berikut:

“Umpamanya di sini kalau tradisi itu, umpamanya ya, hal yang biasanya umpamanya di sini ada perkawinan, ada di sini umpamanya putra dari raja di sini atau cucunya ngambil perempuan atau istri itu, di sini masih ada tradisi dipingit selama 3 hari. Ini Gedung Ekalanga, di sebelahnya namanya Gedung Ekalanga, keluar di sini ada Gedung Ekalanga, Ekalanga, tulisannya, di situ e...baru datang pengantin kita ngambil, upacaranya kan minang, habis minang, ngambil mungkin sama dengan di Jawa, habis ngambil dari rumah perempuannya itu kita langsung bawa ke Gedung Ekalanga di situ dipingit selama 3 hari. Setelah 3 hari, paginya ada upacara supaya dia bisa keluar dari ruang pingitan habis itu baru resepsi (Wardani, wawancara, 4 Juli 2019).”

Meski terlihat sangat patrilineal, namun kondisinya sekarang perempuan sudah bisa mengakses pendidikan dan memiliki peran lebih maju di masyarakat. Bisa dibayangkan budaya patrilineal yang sudah mengakar di Bali sejak lama harus berkompromi dengan kehidupan modern yang memberikan perempuan kesempatan lebih banyak untuk berperan. Tujuan mempertahankan prosesi pingitan hanya lah semata-mata karena pelestarian budaya Karangasem ke generasi penerus.

DG berpendapat bahwa generasi penerus menjadi kunci utama dalam pelestarian budaya Karangasem, terlebih lagi mereka harus berhadapan dengan kemajuan teknologi informasi, seperti sekarang ini yang membuat akses terhadap produk budaya luar semakin cepat, sehingga tidak sedikit membuat kaum muda meninggalkan budayanya. Sadar pentingnya kaum muda, DG menjelaskan telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong keterlibatan mereka, sebagai berikut:

“Kita mencoba untuk ya generasi muda sekarang anak-anak sekarang supaya tidaklah terbawa arus gitu (ada suara mengganti kaset). Jadi boleh mengikuti, tapi jangan melupakan tradisi. Jadi kita berusaha, kalau di puri ini kan kita berusaha Mbak kita ada organisasinya. Jadi kita kan ada di *group*, punya *group* WA itu. Jadi setiap ada acara-acara, kita harapkan mereka hadir. Ada keharusan.....(sambung) Mereka harus hadir. Supaya tahu bagaimana tradisi di sini, seperti kemarin sudah, baru tanggal berapa kita menerima raja-raja seluruh Indonesia, ini kan ada pertemuannya kami di sini sebagai tuan rumah untuk menjamu makan siang, kami libatkan semua generasi muda, supaya dia tahu bagaimana di sini, terus kalau setiap upacara kita libatkan, supaya dia ikut tahu bagaimana adat di sini, jadi tahu, *ndak* lupa dia (Wardani, wawancara, 4 Juli 2019).”

Dengan melibatkan pemuda-pemudi dalam acara kerajaan maka akan timbul rasa memiliki terhadap budaya Karangasem. Pelibatan pun dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan wadah organisasi Pengelola Puri Agung Karangasem, mendorong para anak muda untuk terlibat dalam acara raja-raja seluruh Indonesia di Karangasem. Adapun acara raja-raja seluruh Indonesia yang dimaksud adalah acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-379 Kota Almapura dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ke-7 pada tanggal 22 dan 23 Juni 2019 (Suarna, 2019). Pada akhirnya, dengan munculnya rasa memiliki akan budaya Karangasem di kalangan anak muda, maka menjadi bibit penerus pelestarian budaya.

Kembali ke tanah Jawa, seorang putri ke-3 dari Mangkunegara VIII dan Permaisuri/Kanjeng Ratu, yakni G.R.A. Retno Rosati Kadarisman Notohadiningrat (RRK) mendapat nasihat dari sang Ibu, bahwa hidup sebagai keluarga raja di zaman transisi kerajaan menuju kemerdekaan Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, terutama karena keraton nanti akan jadi *heritage* yang terbuka untuk semua orang. Sebuah potongan wawancara bertema Kerabat Kerajaan Nusantara yang dilakukan oleh ANRI kepada keluarga Kadipaten Mangkunegaran memperlihatkan munculnya kesadaran sedari lama akan peran pewaris budaya bagi para perempuan yang hidup di Pura Mangkunegaran. Kepada Tim Pewawancara Sejarah Lisan ANRI yang diwakili oleh Toto Widyarsono dan Mudanto Pamungkas tanggal 10 Mei 2014 di Pura Mangkunegara, RRK menjelaskan bagaimana dirinya dididik dari kecil sebagai putri Mangkunegara dengan tradisi Jawa, sebagai berikut:

“Sebagai putri dari Mangkunegara ke-VIII, harus tinggal di Keputren, tempat tinggal khusus putri. Semasa kecil kegiatan terbatas di sekitar Mangkunegaran. Tidak boleh ikut Pramuka atau ke bioskop. Taman Kanak-kanak (TK) di lingkungan Mangkunegaran, Sekolah Dasar (SD) di panti, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pamedan dengan pengawalan, Sekolah Menengan Atas (SMA) di SMA Negeri 4 di Manahan, harus tinggal bersepuluh bersama para sepupu agar berbaur. Adik-adiknya sudah boleh bersekolah di luar. Sepulang sekolah wajib merawat diri, seperti luluran dan minum jamu. Wajib bisa menari, belajar menjahit hingga sedikit bermain piano. Sering menari di kegiatan Mangkunegaran, tetapi menari di dalam keraton, tidak boleh di luar.

Harus belajar tradisi Jawa, simbol-simbol warna, filosofi *Tri Dharma* dan lainnya. Sebelum tidur harus pamitan pada Eyang Ratu Timur dengan membawa baki berisi sikat, handuk (Notohadiningrat, wawancara, 10 Mei 2014).”

Pendidikan ketat tersebut telah memberikan modal pengetahuan dan mental untuk seorang putri yang saat ini memegang peran penting dalam pelestarian budaya Mangkunegara. Tidak hanya menjalankan adat istiadat saja, RRK juga membina masyarakat untuk melestarikan budaya, serta melakukan promosi pariwisata. RRK kini merawat Sanggar Tari Surya Sumirat di Pura Mangkunegaran yang didirikan sejak tahun 1982 oleh adiknya yang meninggal 2 tahun sebelum wawancara, Gusti Pangeran Haryo (GPH) Herwasto Kusumo. Sanggar tari Surya Sumirat sering kali mendapat undangan pentas di berbagai festival, hingga Perancis, Maroko, Jepang, Belanda, Moskow, Malaysia, Singapura, China dan lain-lain (Rusdiyana, 2018). Bahkan sehari sebelum wawancara di malam hari, 9 Mei 2014 sanggar tari Surya Sumirat tampil di acara Mangkunegaran Performing Art 2014, sebuah acara yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai kesenian dari Pura Mangkunegaran (Wawasan, 11 Mei 2014). Selain itu, RRK juga membina Himpunan Kerabat Ageng Mangkunegaran Suryasumirat (HKMN) yaitu wadah yang dirintis oleh ayahnya untuk menghimpun para kerabat guna menopang eksistensi Mangkunegara, berikut pernyataannya:

“Nah kalau mengenai himpunan kerabat tadi kan memang dibentuk sebagai gagasan dari ayah kami Mangkunegoro ke-VIII tujuan pembentukannya sebetulnya tidak lepas dari kesadaran beliau akan perubahan jaman. Bahwa ketika Mangkunegaran sudah bukan lagi pusat pemerintahan maka kekuatan terbesar tidak terletak pada Pengageng Puro melainkan justru pada kerabat yang sudah berkembang sedemikian banyak di berbagai wilayah. Ada yang jadi ada yang di DPR, di MPR, tapi sekarang juga sudah sangat berkurang. Kekuatan dan suara kerabat ini perlu dihimpun untuk menopang eksistensi Mangkunegaran terutama secara kultural (Notohadiningrat, wawancara, 10 Mei 2014).”

Sudah sejak lama Mangkunegara VII menyadari perubahan zaman yang telah menggeser kedudukan kadipaten, sehingga melakukan langkah antisipasi dengan membuat wadah untuk mempertahankan eksistensi. Terlebih lagi, upaya kekerabatan seperti itu juga dijalin Mangkunegaran kepada kerajaan-kerajaan nusantara lainnya, dengan terlibat aktif dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) yang mana upaya itu juga dilanjutkan oleh RRK.

Dalam menjawab tantangan pengaruh budaya asing di era globalisasi saat ini, RRK memiliki pandangan tersendiri. RRK berpendapat bahwa Mangkunegaran tidak menutup diri, sebagai berikut:

Pada dasarnya Mangkunegaran tidak pernah tertutup atau anti terhadap budaya asing dan globalisasi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa-bahwa ada pula pengaruh baik yang dibawa oleh globalisasi akan tetapi yang terpenting adalah bahwa sebagai warga negara Indonesia terutama sebagai trah Mangkunegaran ditanamkan nilai-nilai seperti dicetuskan oleh pendahulu kami ya itu Mangkunegara Pertama dalam ajaran *Tri Dharma*. Nah nilai-nilai di atas itu lah yang kami coba terus wariskan kepada generasi pada generasi-generasi penerus supaya mereka dengan gaya dan dinamika jamannya tetap peduli kepada Mangkunegaran (Notohadiningrat, wawancara, 10 Mei 2014).”

RRK menekankan pentingnya *Tri Dharma* ajaran Mangkunegara I sebagai benteng budaya di era globalisasi. *Tri Dharma* dalam konteks saat ini yang dimaksud RRK, yaitu *rumongso melu handarbeni* itu bahwa sejauh apapun jarak kita dengan Mangkunegaran, ketika Mangkunegaran memanggil untuk berbagai keperluan, maka tunjukkan bahwa kita peduli dan punya rasa memiliki. Kedua, wajib *melu hanggondeli*, setiap kerabat Mangkunegaran dengan berbagai upaya yang tidak bertentangan dengan hukum berkewajiban untuk mempertahankan eksistensi Mangkunegaran. Ketiga, *mulat sariro hangroso wani*, tiap kerabat Mangkunegaran memiliki kesadaran untuk senantiasa mengintrospeksi diri sebelum akhirnya mengambil suatu tindakan (Notohadiningrat, wawancara, 10 Mei 2014). Ajaran ini lah yang RRK bersama keluarga Mangkunegaran wariskan kepada generasi penerus agar tetap peduli kepada Mangkunegaran di masanya.

Berpindah ke Kasunanan Surakarta, ANRI mewawancarai seorang putri dari pasangan Pakubuwono XII dengan Raden Ayu Pradapaningrum pada tanggal 9 Mei 2014 dalam rangka sejarah lisan dengan tema Kerabat Kerajaan Nusantara, ialah GKR Koes Murtiyah Wandansari (KMW) yang cukup memiliki peran penting dalam pelestarian budaya, bahkan pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Kepada Tim Pewawancara Sejarah Lisan ANRI yang saat itu juga diwakili oleh Toto Widyarsono dan Mudanto Pamungkas di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KMW menerangkan peran pentingnya dalam pelestarian budaya di Kasunanan Surakarta, sebagai berikut:

“Lha sekarang ini saya di pemerintahan Pakubuwono ke-13 saya posisinya sebagai Pengageng Sasono Wilopo. Sasono Wilopo itu kalau dalam e...pemerintahan republik itu adalah e...menteri sekretaris negara itu. Tapi juga itu menjadi koordinator seluruh e...-bebadan-bebadan (Wandansari, wawancara, 9 Mei 2014).”

Bebadan adalah sebutan untuk institusi yang menjalankan pemerintahan keraton. Kedudukannya yang setara sekretaris negara di pemerintahan Republik Indonesia itu memperlihatkan bahwa KMW adalah perempuan keraton yang memiliki peran penting dalam pelestarian budaya. Sejak kecil, KMW mendapatkan kesadaran pentingnya budaya dari hasil didikan ibunya yang mengajarkan *macapat*, yaitu tembang Jawa yang bermuatan wawasan hidup agar menjadi seorang manusia secara utuh, berbudaya, dan beragama. Selain itu, KMW menempuh pendidikan di sekolah-sekolah keraton, salah satunya sekolah *Pamardi Putri*. KMW juga diajarkan tari-tarian oleh ibunya, bahkan sebelum KMW menjabat struktural, ia bertanggung jawab atas tarian-tarian di dalam keraton, seperti tari Serimpi dan Bedoyo. Proses pendidikan keluarga dan formal itu memberikan basis pengetahuan kepada KMW untuk berkiprah dalam upaya pelestarian budaya. KMW pun menjadi Ketua Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta yang berdiri sejak tahun 1992 (Wandansari, wawancara, 9 Mei 2014). Kemudian, KMW juga terlibat aktif dalam Putri Narpo Wandowo, yakni sebuah organisasi perempuan bergerak di bidang budaya yang terbentuk sejak 1931 (Sunaryo, 2020).



Surakarta pada zaman Pakubuwono X, empat orang penari bangsawan menampilkan tarian tradisional Jawa Srimpi tanggal 1 Januari 1909. Sumber: Arsip Nasional Belanda. Fotocollectie Deli Maatschappij. Referensi Katalog 2.20.46. Nomor Inventaris 818_17.

KMW memandang budaya Jawa sangat penting untuk selalu diajarkan kepada masyarakat. Melalui sanggarnya, KMW mengajarkan ajaran-ajaran dari budaya Jawa, sebagai berikut:

“saya kan juga ada sanggar tadi yang saya sampaikan itukan yang paling utama kan mempelajari tiga hal sebetulnya untuk menguasai namanya budaya Jawa itu *subo sito*, *nggih* terus *tata basa*, *tata susilo*. Tiga itu yang paling utama yang kita berikan kepada masyarakat yang-yang kebetulan masih membutuhkan dan itu kebanyakan juga guru-guru (Wandansari, wawancara, 9 Mei 2014).”

Pernyataan itu sekaligus memberikan gambaran bahwa bagi KMW dalam menghadapi perkembangan zaman sangat penting berpegang teguh. Terkait dengan *subo sito*, *tata basa*, dan *tata susilo* merupakan salah satu bagian dari etika dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat dalam budaya Jawa (Purwadi, 2011). Ajaran-ajaran seperti itu lah yang KMW bersama keluarga keraton sebar luaskan untuk pelestarian budaya.

Penutup

Dari ketiga wawancara sejarah lisan ANRI kepada keluarga kerajaan nusantara telah sangat jelas memperlihatkan perempuan memberikan sumbangsih penting dalam pelestarian budaya. Kegiatan itu, bisa dibilang cukup berhasil dalam memunculkan peran perempuan Kerajaan Nusantara dalam pelestarian budaya. Masih banyak hal-hal penting lainnya yang dapat dibahas

dari wawancara sejarah lisan ANRI yang bertemakan Kerabat Kerajaan Nusantara, terkait topik tentang perempuan maupun hal-hal lainnya mengenai kerajaan. Pastinya hasil sejarah lisan ini dapat menjadi sumber alternatif sebagai pelengkap khazanah arsip ANRI yang berguna bagi masyarakat untuk dimanfaatkan saat ini hingga di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI. KIT Bali No. 0174 10-12.

ANRI. KIT Jawa Tengah No. 224-72.

Arsip Nasional Belanda. *Fotocollectie* Deli Maatschappij. Referensi Katalog 2.20.46. Nomor Inventaris 818_17.

Sejarah Lisan ANRI

Anak Agung Ayu Dewi Girindra Wardani, diwawancarai oleh Eva Julianty, 4 Juli 2019, Arsip Sejarah Lisan, Arsip Nasional Republik Indonesia.

GKR Koes Murtiyah Wandansari, diwawancarai oleh Toto Widyarsono dan Mudanto Pamungkas, 9 Mei 2014, Arsip Sejarah Lisan, Arsip Nasional Republik Indonesia.

G.R.A. Retno Rosati Kadarisman Notohadiningrat, diwawancarai oleh Toto Widyarsono dan Mudanto Pamungkas, 10 Mei 2014, Arsip Sejarah Lisan, Arsip Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Republik, Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Lembaran Negara RI Tahun 2012. Jakarta: Sekretariat Negara.

Buku

ANRI. 2005. *Daftar Arsip Rekaman Suara (Rekaman Wawancara Sejarah Lisan) 1973-1994*. ANRI: Jakarta.

ANRI. 2006. *Daftar Arsip Rekaman Suara (Rekaman Wawancara Sejarah Lisan) Tahun 2002*. ANRI: Jakarta

Ardika, I Wayan dan Suastika, I Made. 2019. *Melestarikan Tradisi dan Mengungkap Makna Aci Usaba Sumbu di Desa Pakraman Timbrah, Karangasem, Bali*. Denpasar: Swasta Nulus.

Bachtiar, Harsya W. 1982. "Pengantar Oleh Ketua Panitia Pengarah Sejarah Lisan ANRI", *Lembaran Berita Sejarah Lisan* No. 9. Jakarta: ANRI, hlm. 11.

Budharta, Ida Bagus Gde, dkk. 1986. "Pertumbuhan Ide Nasionalisme dalam Masyarakat Bali" *Laporan Penelitian*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Carey, Peter dan Houben, Vincent. 2018. *Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Gardine, Mayling Oey. 1996. *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta : Grafiti Pers.

Kasuma, Gayung. 2020. *Dari Privat ke Publik: Kehidupan Seksual di Jawa Awal Abad ke-20*. Temanggung: Kendi.

Kumar, Ann. 2008. *Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihtwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke-18*. Depok: Komunitas Bambu.

Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Robinson, Geoffrey. 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LKiS.

Artikel

- Astuti, Riandini Tri dan Pratama, Yogi Pasca. 2015. Kraton: Menjaga Perempuan, Menjaga Kebudayaan (Studi Kasus Abdi-dalem Perempuan Kraton Kasunanan Surakarta). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*: Vol. 15 No. 2. doi: 10.20961/jiep.v15i2.9912
- Erman, Erwiza. 2011. Penggunaan Sejarah Lisan Dalam Historiografi Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*: Vol. 13 No. 1. doi:10.14203/jmb.v13i1.94
- Gluck, Serna. 1977. What's so Special about Women? Women's Oral History. *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 2(2), 3-17. doi:10.2307/3346006
- Hastuti, Dhian Lestari, dkk. 2021. Peran dan Kedudukan Perempuan Mangkunegaran dalam Sejarah Perkembangan Kebudayaan Jawa Masa Mangkunegara I-VII. *Prosiding: Seni, Teknologi, dan Masyarakat*: Vol. 5. doi: 10.33153/semhas.v3i0.138
- Hoyle, Norman. 1972. "Oral History" in *Library Trends*, Volume 21, No. 1. Pp. 60-83.
- Pardi, I Wayan. 2018. Perdagangan Budak di Pulau Bali Pada Abad Ke XVII-XIX. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*: Vol. 20 No.1. doi: 10.14203/jmb.v20i1.501.
- Purwadi. 2011. Etika Komunikasi dalam Budaya Jawa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*: Vol. 9, No. 3, hlm. 139-249.
- Rahmawati, Ni Nyoman. 2016. Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*: Vol. 1 No.1: 58-64.
- Wardhana, Christiana Dwi. 2015. "Kesetaraan Gender dalam Babad T tutur Karya Mangkunegara I". Teks materi siaran Nguri-Nguri Kabudayaan Jawi di RRI Surakarta.

Koran

Wawasan 11-5-2014.

Produk Akademik

Abdullah, Agus Fachzuri Rofiansyah. 2016. *Dampak Munculnya Simbol Modernitas Di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 1980 – 2014*. Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Web Page

- Andanawati, Indira. 21-12-2020. *Prajurit Perempuan, Antara Kemahiran dan Anti Pengkhianatan*. [Tirto]. (Diakses melalui <https://tirto.id/prajurit-perempuan-antara-kemahiran-dan-anti-pengkhianatan-f8c5>, 26-3-2021).
- Rusdiyana, Novita. 24-8-2018. Sanggar Tari Soerya Sumirat. [Surakarta.go.id]. (Diakses melalui <https://surakarta.go.id/?p=11083>, 29-3-2021).
- Sejarah Bali. 12-6-2020. Seorang remaja putri bawa sepeda, thn 1953, insert Anak Agung Ayu Mirah, SH. [Facebook page status update]. (Diakses melalui <https://www.facebook.com/SejarahBali/posts/3146889188706442>, 29-3-2021).
- Suarna, Nyoman. 23-6-2019. HUT Ke-379 Kota Amlapura Spesial, Dirangkai Rakernas JKPI Ke-7. [Bali Express]. (Diakses melalui <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/06/23/142763/hut-ke-379-kota-amlapura-spesial-dirangkai-rakernas-jkpi-ke-7>, 29-3-2021).
- Sunaryo, Arie. 6-6-2020. Berusia 89 Tahun, Organisasi Perempuan Keraton Surakarta ini Ingin Lestarkan Budaya. [Merdeka]. (Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/berusia-89-tahun-organisasi-perempuan-keraton-surakarta-ini-ingin-lestarkan-budaya.html>, 29-3-2021).